

# AGUS PAMBAGIO: BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LEMBAGA BARU, *THINKTANK* MENTERI LHK SEBUAH CATATAN UNTUK DIPELAJARI BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN LHK

## WAWANCARA

### Agus Pambagio

(Penasehat Senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan)



Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK) lembaga baru, bisa menjadi *thinktank* Menteri LHK, demikian menurut Dr. Agus Pambagio, penasehat senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Sebagai *thinktank* Menteri LHK, BSILHK membantu Bu Menteri men-*shaping* apa yang harus dilakukan” lanjut Pambagio. Menurutnya BSILHK perlu memetakan apa saja yang urgent untuk dilakukan. “Tugas BSILHK banyak sekali” ujarnya ketika diwawancara di Arborea Cafe, di kawasan Manggala Wanabhakti, Jakarta (30/5).

Dalam akselerasi pembangunan ibu kota negara (IKN), BSILHK memiliki agenda pengendalian lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) melalui penanaman standardisasi LHK. BSILHK juga mempunyai agenda kerja lainnya untuk mendukung Kementerian LHK. Majalah Standar menghadirkan Agus Pambagio, untuk menggali pandangannya terkait BSILHK.

Sebagaimana diketahui, BSILHK terbentuk sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 92 tahun 2020 tentang Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sedangkan struktur organisasinya diatur melalui Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Menurut alumni SMA 3 Jakarta ini, BSILHK merupakan lembaga baru yang tidak bisa mengambil *benchmark* dari tempat lain. BSILHK terbentuk dengan modalitas eks Badan Litbang dan Inovasi, KLHK. Awalnya litbang yang tugasnya *research* dan mengembangkan.

“Apakah peran ini akan diambil lagi?” ujarnya. “BSILHK ini saya pikir lebih pada pembuatan dan perancangan kebijakan. Lebih diarahkan pada pembuatan *policy brief*”.

Agus lalu mencontohkan *policy brief* tentang perubahan iklim, karbon dan DAS. Menurutnya hal ini lebih penting, sehingga Menteri selain membahas dengan eselon I terkait, juga ada BSILHK yang melakukan kajian khusus terkait *policy*.

Contoh lain, misalnya yang lagi *in* UNFCC di Mesir. Agus menantang BSILHK untuk membuat *research analysis* untuk kebijakan yang akan dibahas di sana.

“Jika untuk Menteri cukup dua halaman *policy brief*, jika untuk eselon I lain bisa dengan *policy paper* maksimal 10 halaman” lanjutnya. Sehingga, menurutnya Menteri dan eselon I-nya lebih mendorong memfokuskan pada hal-hal yang memang sudah disiapkan.

Agus lalu menceritakan yang terjadi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Beberapa rencana dikaji lebih dahulu terutama terkait kebijakannya dan dikaitkan dengan yang dilakukan Badan Riset

dan Inovasi Nasional (BRIN) pada sektor PUPR. Menurut ini bisa juga dilakukan pada sektor LHK.

*Policy brief* dan *policy paper* biasanya sifatnya *voluntary*, artinya digunakan lebih baik namun tidak wajib digunakan. Namun Pambagio menyatakan bahwa bisa dibuat *mandatory*.

“Bisa dibuat *mandatory*” ujarnya. Lebih lanjut Pambagio mencontohkan, suatu analisa yang harus segera ditangani karena berbagai alasan dan dukungan kebijakannya ada, selain itu ada/tidak ada irisan dengan kementerian/ lembaga lain.

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa jika ingin menjadi *mandatory*, maka harus dibuat standar seperti standar pohon yang bagus, standar karbon, dan lain sebagainya. BSILHK membuat kebijakannya, tidak membuat penelitian saintifiknya.

Tugas BSILHK seperti *“thinktank”* nya Menteri. Menteri punya program apa, oleh BSILHK dikaji dulu, BSILHK tidak melakukan penelitian fisik, karena hal ini sudah menjadi ranah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Pengamat kebijakan publik ini kembali memberikan contoh tentang kebijakan *microorganism*, yang banyak kita miliki dan merupakan masa kita. Jika akan meneliti mikroorganisme, harus diperhatikan apanya, untuk itu perlu disiapkan kebijakannya.

Menurutnya sebagai *thinktank* Menteri, BSILHK memetakan apa saja yang *urgent*. Menteri tidak langsung menyuruh dirjen atau eselon I. Misalnya terkait perubahan iklim, maka bisa diskusi dengan Dirjen Perubahan Iklim. Begitu juga di sektor DAS, limbah, B3, dan sebagainya juga diskusi dengan dirjen terkait. Sehingga para menteri dan dirjen ketika akan melangkah, terlebih dahulu membaca apa yang sudah dibuat oleh BSILHK.

Dalam konteks kemudahan perizinan berusaha, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK). Menurut Agus Pambagio, BSILHK dapat membuat kajian dan standar. Misalnya dalam perizinan ekowisata, pembangunan jembatan di Bromo, BSILHK dapat melakukan kajian *policy* lingkungan dan *safety*-nya.

Agus Pambagio menjelaskan BSILHK melakukan analisa dan kajian supaya implementasi di semua level eselon I sampai Menteri dapat berjalan dengan baik. Menurut alumni *George Washington University* ini, biasanya yang mengkaji eselon I lalu ke biro hukum. Ini belum berbentuk peraturan, bisa jadi rancangan peraturan, bisa jadi cikal bakal kebijakan dari Menteri atau bisa menjadi instrumen baru standar sesuai dengan aturan.

Agus mengatakan nantinya apa yang dibuat BSILHK itu bisa disinkronkan

dengan BRIN, misal ketika BSILHK mengkaji ini, di BRIN meneliti ini, idealnya seperti itu. Namun hal tersebut memang tidak mudah. Namun, jika secara regulasi bisa dibiayai maka bisa berjalan.

Pambagio mendorong agar BSILHK membentuk sesuatu dan segera diajukan ke Menteri, BSILHK perlu menjelaskan konsentrasinya di mana, karena kajian saintifik sudah merupakan tupoksi BRIN. Lebih lanjut dicontohkan, jika BRIN sudah membuat kajian terkait LHK, dan menurut Menteri sudah bagus, maka BSILHK membuat analisa dari sisi kebijakan. Hal ini supaya kelihatan bahwa BSILHK kerja.

“Kita tunjukkan bahwa kita aktif bekerja” ujarnya. “Memang mau tidak mau *counterpartnya* di BRIN harus termonitor, kita buat standar”.

### Pembangunan IKN dan standar

Dalam upaya berperan di dalam proses pembangunan IKN, BSILHK saat ini sedang



Sebagai *thinktank* Menteri LHK, BSILHK akan membantu Bu Menteri *men-shaping* apa yang harus dilakukan terutama terkait kebijakan, menurut Agus Pambagio BSILHK sebelumnya perlu memetakan apa saja yang *urgent* untuk dilakukan.

menyiapkan standar makro dan standar mikro. Standar makro disusun berbasis lansekap, sedangkan standar mikro berbasis kegiatan. Terdapat 10 kluster standar makro dan 26 kluster standar. Standar dikategorikan dalam 4 tahap a) Pra Kontruksi, b) Kontruksi, c) Operasi dan d) Pasca Kontruksi, dan 4) Pemantauan. Untuk menyelesaikan seluruh kluster tersebut, BSILHK telah membentuk 19 kelompok kerja (*Working Group-WG*) yang terdiri dari manajemen dan para ahli (peneliti eks BLI LHK).

Pambagio mengapresiasi langkah BSILHK tersebut. Pambagio juga mengingatkan bahwa IKN terdiri dari ribuan hektar yang harus cepat-cepat dibangun. Izin lingkungan hidupnya tidak bisa parsial, sehingga perlu dibuat payung besar izin lingkungan yang menyeluruh. Ternyata di lapangan sekarang banyak sekali hal-hal kritikal yang perlu dibuat kajiannya, misalnya koridor satwa, jenis tanaman endemik, ketersediaan air dan hal-hal lain yang kritikal.

Pengamat Kebijakan Publik ini juga menyampaikan bahwa titik nol IKN panas sekali, pohon eukaliptus menghisap air lebih banyak daripada sawit. "Bahkan ketika dibor sampai 130 meter air belum keluar. Hal ini perlu dipikirkan harus bagaimana" ujarnya. Lebih lanjut Pambagio mengungkapkan ada wacana salah satu sungai akan dibendung sebagai sumber air. Namun apakah hal tersebut bisa. "Maka kajian ini menjadi perlu" jelasnya. Termasuk juga kajian DAS. Lebih lanjut diungkapkan Pambagio, jika IKN akan menjadi *forest city*, harus ada kajian supaya hutan yang masih ada tidak diambil orang, karena saat ini sudah mulai diblok-blok. Masyarakat adat Dayak selama ini tidak ada surat menyurat sebagai pemilik tanah. Secara antropologi, hal ini belum ada studinya.

Menurutnya masyarakat adat perlu dilibatkan dalam pembangunan IKN, namun sampai saat ini belum ada studinya. Agus Pambagio menceritakan bahwa sudah punya rencana untuk mengundang para antropolog untuk berdiskusi terkait hal ini, bahkan sudah disampaikan ke Menteri PUPR. Ini kritikal. Menurutnya ini perlu dikaji juga oleh BSILHK. Studi-studi sosial harus dilakukan, tidak hanya studi teknis.

Menurut pengalaman Agus, dalam pelibatan masyarakat harus ada *champion*-nya. Yaitu orang-orang yang punya ide dan disegani. *Champion* biasanya bertindak sesuai dengan ucapannya. Apa yang disampaikan, dilaksanakan. *Champion* biasanya tokoh masyarakat atau anak-anak muda yang lulus sarjana kembali ke

daerahnya. Ide-ide para *champion* bisa dipakai dalam komunal mereka.

"*Champion* bisa dicari" ujarnya. Agus menceritakan para kepala satuan kerja seperti, Ishak Yassir Kepala BPSILHK Samboja itu sudah tentu tahu. Mereka perlu didekati. Mengingat studi lingkungan secara payung besar belum ada aturannya. Selain studi teknis, menurutnya studi sosial melalui para *champion* ini bisa dilakukan.

Wilayah pusat IKN berada di bekas kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI), bukan hutan primer. Perlu langkah antisipatif untuk mengurangi dampak salah satunya dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Selain hal tersebut, Agus menyatakan bahwa analisa dampak lingkungan itu penting. Jika tidak ada, maka bagaimana kita dapat membangun daerah tersebut. Beberapa hal yang perlu diketahui antara lain airnya bagaimana, pengelolaan sampahnya bagaimana, jika ada industri apa saja. Harus ada studi lingkungan. Selain itu, sebagai HTI ada tanamannya yang harus ditebang dan diganti (red: ganti rugi). Berapa ongkosnya, perusahaan sudah melakukan penanaman pemupukan, dan lain-lain. Belum lagi batubaranya, di jalan tersebut tidak sampai satu meter sudah terlihat batubaranya. Hal ini perlu kajiannya, bagaimana finansialnya.

Dalam konteks pengendalian dampak lingkungan akibat kerusakan hutan tersebut, menurut Agus juga perlu ada identifikasi potensi gangguan. Lebih lanjut Agus menjelaskan, hal tersebut perlu dianalisa, dibatasi misalnya yang sektor LHK saja, mana yang menjadi potensi gangguan, selain soal tanah. Tenurial sudah pasti merupakan potensi gangguan. Kajian lain antara lain terkait pohon endemik, asal bibit, dan lain-lain. Menurutnya masih banyak yang masih perlu kajian dan dipersiapkan, pemerintah belum bisa dalam waktu dekat pindah ke IKN, saat ini yang paling dekat Balikpapan.

BSILHK mempunyai satuan kerja yang berlokasi dekat dengan IKN, yaitu Balai Penerapan Standar Instrume Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPSILHK) Samboja. Menurut mantan wakil Ketua YLKI ini, sumber daya di Samboja cukup bagus. Sumber daya manusianya bagus dan herbarium digital yang ada dapat digali banyak. Menurutnya BSILHK akan bisa membantu banyak.

Agus menyarankan agar didiskusikan internal dulu dengan Kepala BSILHK, batasan yang akan dibuat dan bagaimana caranya mengkaitkan dengan yang dibuat BRIN. Jadi secara teknis

ada dan secara kebijakan ada. Tentu tidak mudah, namun jika didiskusikan pasti bisa jalan. Agus juga menyarankan agar mengambil 3-5 komoditas dulu, untuk mengetahui Menteri atau eselon I lain terbantu atau tidak.

Menanggapi kondisi *existing* di wilayah IKN, Agus berpendapat agar tanahnya dinormalkan dulu. Sebelumnya tanah tersebut disodot airnya oleh tanaman eukaliptus, maka perlu dinormalkan dulu. Saat perusahaan HTI masih beroperasi, masih produksi dengan menebang tanaman untuk bahan baku pabrik kertas.

Perusahaan tersebut sudah sudah menanam, jika sekarang sebagian tidak boleh ditebang, perlu diselesaikan secara sosial, perlu diteliti secara sosial. Antara lain bagaimana ganti rugi tanaman, ganti rugi batubara. Selain itu sebagai lahan bekas tambang, menurutnya perlu dipikirkan pohon atau tanaman yang cocok untuk lahan bekas batubara. Vegetasinya bagaimana, apakah perlu lapisan tanah sendiri, atau seperti eukaliptus yang tidak perlu dikasih tanah, langsung ditancap bisa hidup. Hal-hal seperti ini yang perlu dikaji. Untuk menjadi *forest city* perlu diperkirakan berapa lama dan tanamannya tanaman apa saja. BSILHK bisa membuat kajian dan analisisnya.

Agus menyarankan agar BSILHK datang ke IKN, melihat langsung. Dari sana nanti akan tahu bagaimana. Ia menceritakan bahwa sudah dua kali ke lokasi IKN, titik nol bergeser dari tadinya di bagian atas geser ke bagian lembah. Kontur tanahnya berbeda. Lokasi sebelumnya ada menara untuk memantau api dan jalan aksesnya. Lokasi yang sekarang jalannya memotong bentang alam, studi lingkungannya belum selesai, namun sudah dikerjakan.

Menurutnya perpindahan kantor kementerian ke IKN, entah nanti dimana belum ada tempatnya. Di situ ada penduduk. Ada transmigrasi, yang juga perlu dialami. Hal ini yang memerlukan kajian antropologi. Sebelumnya, semua pembangunan

infrastruktur tidak pernah ada studi antropologi, hanya studi teknis. Kearifan lokal perlu diperhatikan sebelum mulai pembangunan, masyarakat itu penuh dengan macam-macam pandangan, jika tidak kita tangani bisa menjadi konflik.

Pekerjaan rumah lain yang harus diluruskan, dalam melakukan kajian, yang merupakan tupoksi BRIN, menurut Agus Pambagio agar tidak menjadi temuan Inspektorat atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maka perlu terlebih dulu dikonsultasikan. Tupoksi dari Menteri seperti apa saja dan bagaimana dari sisi audit. Harus dipastikan dari sekarang sebelum audit, untuk memastikan yang dikerjakan tidak menjadi temuan Inspektorat/BPK di kemudian hari.

Mengakhiri perbincangan, Pambagio menyampaikan pandangannya terkait penanaman standar jika BSILHK membuat standar lalu diterapkan pada sistem Amdalnet. Menurutnya hal ini bisa saja dilakukan. Yang penting kajian jelas, tujuannya apa. Misalnya kenapa begini, karena peraturannya begini. Kalo tidak boleh, lalu diapakan? Jadi harus dibuat peraturan, menurutnya soal boleh - tidak boleh, taat aturan atau tidak tergantung kajian. Misalnya sesuatu boleh dan banyak manfaatnya untuk masyarakat. Jika aturannya belum ada, maka bisa diusulkan, jika aturan sudah ada namun belum sesuai maka bisa diusulkan revisi.

Dari pemaparan dan penjelasan diatas, terlihat bahwa BSILHK bidang kerjanya jadi luas sekali. Agus memberikan strategi agar BSILHK membuat *pilot projet*. Agus juga berpesan agar *pilot project* diurut sampai selesai, sehingga kelihatan manfaatnya. Menurutnya jangan semua dikerjakan, jika sudah berhasil lebih mudah untuk duplikasi (red: replikasi). Yang penting yang terjangkau yang mudah - *low hanging fruit*, yang mudah diimplementasi dan ada manfaatnya. Apa yang telah dibuat nanti direview sehingga ketika mengerjakan yang lain sudah ada perbaikan.

---

Agus Pambagio, merupakan alumni *Graduate School of Engineering & Applied Science* di the *George Washington University* di Washington DC.

Sebelum menjadi penasehat senior Menteri LHK, pria ini berkarir di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) selama hampir 18 tahun. Posisi terakhir yaitu wakil ketua pengurus harian yang dilepasnya di tahun 2021. Selain di Kementerian LHK, alumni SMA 3 Jakarta tahun 1979 ini juga aktif menjadi penasehat di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR dan Kementerian BUMN. Agus Pambagio sebelumnya juga mendampingi Ignasius Jonan di PT KAI maupun di Kementerian ESDM.

Pada saat krisis multi dimensi tahun 1998, Pambagio bersama Garin Nugroho (Sutradara) mendirikan dan memimpin Kelompok Kerja Visi Anak Bangsa yang bergerak di Program *Civic Education*. Program yang ditugaskan yaitu menata kembali kehidupan masyarakat Indonesia berdemokrasi supaya tidak terjadi konflik multi dimensi yang berkepanjangan akibat krisis 1998. Program ini bahkan dijadikan percontohan bagi negara lain yang juga sedang menghadapi konflik multi dimensi, seperti Bosnia, Lebanon, negara Eropa Timur serta Amerika Latin dan lain-lain.

Pada tahun 2006, Agus Pambagio mendirikan *PH&H Public Policy Interest Group* yang berkecimpung di ranah advokasi, lobby dan negosiasi lokal dan Internasional. Saat ini, pria berkaca mata ini juga menjadi ketua dan anggota di beberapa panitia seleksi eselon 1 dan 2 di beberapa kementerian/lembaga, termasuk di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan..